



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 010/16012009
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 16 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Gudang PBB Rusak Parah Dihantam Bom Fosfor Israel	3
	Harga Minyak Dunia Merosot Karena OPEC Pangkas Proyeksi Permintaan	3
	ASEAN People's Center Diluncurkan di Jakarta	4
	Jepang Tawarkan Kerjasama Atasi Kecelakaan Laut Indonesia	5
	Genosida di Gaza	6
	Israel Diserang Habis-habisan di Majelis Umum PBB	6
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
	Pemimpin Indonesia Perlu Tiru Obama	8
B.	EKONOMI	
	Pemerintah Berikan Tiga Macam Stimulus	8
	UE Cabut Larangan Terbang Paling Lambat Juni 2009	9
	Pemerintah Ancam Pidanakan Exxon	10
	Industri Tekstil ASEAN Setuju Supply Change	11
C.	SOSBUD	
	Erman Surati Saudi Soal TKI	11
D.	HANKAM	

		Korvet KRI Diponegoro Ditugaskan dalam Satgas Perairan UNIFIL	12
E.	HUKUM		
		Lemhannas Setuju Kenaikan Anggaran Pertahanan	13
F.	OLAHRAGA		
		Pia and Adrianti handed tough matches	13
		Timnas PSSI Kalahkan Al-Shabab 3-2	14
G.	LINGKUNGAN HIDUP		
		Indonesian sky less polluted, govt claims	14
III.	ARTIKEL		
		UU BHP Tidak Meliberalisasi Pendidikan oleh Sukemi	15
IV.	LAIN-LAIN : Tidak Ada		
V.	EDITORIAL		
		The President's piece of cake	17
		Press uncertainty in 2009	17
		Menghapus Kesan Buruk Ketua MA Terpilih	19

Jakarta, 16 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Gudang PBB Rusak Parah Dihantam Bom Fosfor Israel

PBB, (ANTARA News) - Sebuah gudang di kompleks bangunan PBB di Jalur Gaza rusak parah Kamis terkena serangan Israel yang tampaknya bom fosfor putih, kata kepala urusan kemanusiaan PBB John Holmes seperti dilaporkan Reuters.

"Gudang utama itu rusak parah oleh apa yang tampaknya bom fosfor putih," kata Holmes kepada wartawan pada jumpa pers di New York.

"Mereka yang berada di lapangan tidak ragu-ragu lagi mengenai bom itu. Jika anda meminta konfirmasi, itu seperti yang saya sebutkan," katanya.

Kompleks bangunan itu milik Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch sudah menuduh Israel melancarkan serangan dengan bom fosfor putih, yang bisa digunakan untuk tidak saja untuk menandai sasaran namun juga sebagai senjata pembakar bangunan.

Israel menolak berkomentar mengenai penggunaan amunisi tersebut namun mengatakan, militer negara itu menggunakan senjata yang tidak melanggar hukum internasional. Kecaman-kecaman terhadap militer Israel juga datang dari dalam negeri.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan, Rabu, ofensif Israel terhadap Hamas di Jalur Gaza telah menimbulkan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil di wilayah Palestina itu.

Mereka menuduh pasukan negara Yahudi tersebut menggunakan senjata-senjata mematikan yang menewaskan ratusan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik itu.

Dalam sepucuk surat yang dikirim kepada Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Menteri Pertahanan Ehud Barak dan jajaran tinggi militer, sembilan kelompok hak asasi manusia itu mengatakan, penduduk sipil di Gaza mengalami penderitaan kemanusiaan yang luar biasa.

"Tingkat pencederaan terhadap penduduk sipil itu belum pernah terjadi sebelumnya," kata kelompok-kelompok itu.

Sejak Israel meluncurkan perang gencar di Gaza, lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan-serangan udara yang tidak terhitung dan pertempuran hebat 10 hari, kata petugas medis di Gaza, Rabu.

Jumlah itu mencakup 315 anak dan 100 wanita. Sebanyak 4.700 orang juga cedera dalam ofensif terbesar yang pernah dilakukan Israel ke wilayah pesisir Palestina itu.

Para penandatangan surat kecaman itu mencakup Komite Umum anti-Penyiksaan di Israel, Dokter untuk Hak Asasi Manusia -- Israel, Yesh Din dan Amnesti Internasional cabang Israel.

Kekerasan di dan sekitar Gaza meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan berakhir pada 19 Desember.

Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran sejak 27 Desember dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.

Setelah pemboman udara beberapa hari, pasukan dan tank-tank Israel melakukan ofensif darat dengan bergerak ke pusat-pusat penduduk utama, termasuk Kota Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin yang berpenduduk 1,5 juta orang itu diblokade oleh Israel. (Antara)

2. Harga Minyak Dunia Merosot Karena OPEC Pangkas Proyeksi Permintaan

New York, (ANTARA News) - Harga minyak dunia jatuh pada Kamis waktu setempat, di tengah terpukuhnya pasar oleh berita ekonomi suram, kekhawatiran terhadap meningkatnya stok energi AS dan proyeksi baru OPEC tentang penurunan permintaan 2009. AFP Melaporkan, kontrak utama New York, minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman Februari, jatuh 1,88 dolar AS menjadi ditutup pada 35,40 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Februari turun 39 sen menjadi mantap pada 44,69 dolar AS di InterContinental Exchange. Kontrak jatuh tempo pada penutupan perdagangan.

Harga minyak telah meningkat pada awal perdagangan, sedikit pulih setelah kinerjanya pada Rabu "mixed".

Namun, harga kembali berbalik melemah setelah OPEC memangkas proyeksi permintaan minyak global, diperkirakan permintaan akan menyusut lebih besar dari ekspektasi 0,2 persen tahun ini.

Tekanan ekonomi dunia diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap permintaan minyak tahun ini, terutama di negara-negara industri," kata Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dalam laporan bulanannya.

"Tahun 2009 diawali dengan sebuah tekanan kuat ekonomi dunia yang mengakibatkan proyeksi permintaan minyak tahun ini menunjukkan pertumbuhan negatif" 0,18 juta barel per hari (bph) atau 0,2 persen, kata OPEC.

Dalam 2008, permintaan minyak global diestimasi mengalami kontraksi 0,1 juta bph, "penurunan pertama dalam lebih dari dua dekade," kata kartel.

Perbaikan stabilisasi harga menjadi pada level yang dapat diterima "akan membutuhkan waktu menghadapi tantangan ekonomi global."

Sejak September kartel yang memasok 40 persen dari produksi minyak mentah dunia, telah memangkas produksinya sejumlah 4,2 juta bph dalam upaya menopang harga minyak yang terus merosot.

Pasar terus memberikan reaksi terhadap laporan pemerintah AS, Rabu, tentang meningkatnya stok minyak mentah AS, menggarisbawahi melemahnya permintaan di konsumen energi terbesar dunia tersebut.

Departemen energi AS (DoE), Rabu mengatakan, bahwa cadangan minyak mentah AS naik 1,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 9 Januari.

Minyak destilasi, yang termasuk bahan bakar pemanas dan minyak disel meningkat 6,4 juta barel pekan lalu.

Mike Fitzpatrick dari MF Global mengatakan disana ada fakta bahwa spiral deflasi sedang berjalan, meski para embuat kebijakan berupaya memompakan likuiditas ke dalam sistem keuangan yang membeku.

"Penurunan harga dalam beberapa bulan terakhir memberikan kesan bahwa hal itu sudah dimulai, ini meminta kerelaan para produsen untuk menahan barang-barang, terutama minyak, dari pasar," kata Fitzpatrick.

"Tetapi, karena laporan cadangan minyak AS kemarin, untuk level stok mendatang harus sejalan dengan perubahan struktur pasar."(Antara)

3. ASEAN People's Center Diluncurkan di Jakarta

Masyarakat sipil Asia Tenggara kemarin menyepakati berdirinya ASEAN People's Center yang berkedudukan di Jakarta.

Tujuan pendiriannya untuk menyerukan agar negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bekerja sama dengan komunitas masyarakat sipil. Dengan demikian, muncul komitmen dari negaranegara ASEAN untuk berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan keputusan yang benar-benar berorientasi pada rakyat di negara-negara Asia Tenggara.

Berdirinya ASEAN People's Center dapat menjadi penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan yang dihasilkan organisasi regional tersebut. ASEAN People's Center berdiri dengan koalisi bersama antarorganisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Tenggara, seperti Solidarity for Asian People's Advocacy (SAPA) Working Group on ASEAN.

ASEAN People's Center akan langsung dipimpin pengurus SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights Rafendi Djamin bersama Deputi Sekjen ASEAN Dr Soeung Rachavy. SAPA Working Group on ASEAN yang memiliki jaringan 80 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara telah berpengaruh terhadap organisasi regional tersebut dalam membuat kebijakan publik.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga telah mendorong bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan faktor lainnya. ASEAN People's Center juga akan menjadi pusat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, lembaga tersebut akan memonitor instrumen-instrumen ASEAN, seperti deklarasi mengenai kebebasan hak-hak migran dan beberapa hal lainnya.

Inilah saatnya kita menyusun draf tentang permasalahan pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN. Dan kemungkinan untuk menerapkan badan tersebut dapat bekerja jangka panjang demi kepentingan masyarakat," kata pengurus SAPA Working Group on ASEAN, Yap Swee Seng.

Tertera dalam Piagam ASEAN Pasal 1.13 bahwa deklarasi tersebut mempromosikan ASEAN yang berbasis pada masyarakat dengan berbagai sektor untuk mendorong orang untuk ikut berpartisipasi dan meraih keuntungan dalam proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.

"Organisasi masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi tentang ASEAN yang berorientasi pada rakyat. Terutama dalam hal proses pembangunan komunitas," ungkap Consuelo Katrina Lopa, pengurus SAPA Working Group on ASEAN.

Perlu diketahui bahwa Piagam ASEAN telah diratifikasi sepuluh anggota ASEAN. Piagam ASEAN akan menjadi kesepakatan yang mengikat pada kesepuluh anggotanya. (andika hendra m) (Sindo)

4. Jepang Tawarkan Kerjasama Atasi Kecelakaan Laut Indonesia

Tokyo (ANTARA News) - Jepang menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan Indonesia untuk membantu mengatasi berbagai kecelakaan laut yang sering terjadi di perairan Indonesia.

Demikian pernyataan yang disampaikan Direktur Kebijakan Lingkungan dan Keselamatan Maritim Departemen Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Turisme Jepang, Hiroaki Sakashita, kepada Antara di Tokyo, Jumat, di tengah kegiatan konferensi internasional mengenai transportasi dan lingkungan.

Sedikitnya 22 negara dan 10 organisasi internasional ikut terlibat dalam konferensi yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) yang disebabkan sektor transportasi di dunia. Sebanyak 23 persen emisi global dihasilkan dari sektor transportasi.

"Kami siap mengirimkan tenaga ahli untuk bertukar pikiran dan juga bantuan teknis lainnya dalam membantu menangani sistem keselamatan kelautan Indonesia. Untuk itu perlu skema kerjasama yang disepakati kedua negara dalam membangun kerjasama yang lebih luas lagi," kata Sakashita.

Masalah keselamatan di laut, katanya, membutuhkan sistem pengawasan serta mekanisme yang tegas dalam ijin berlayar, termasuk mekanisme pemberian bendera nasional bagi kapal-kapal untuk berlayar.

"Kerjasama juga perlu melibatkan badan maritim internasional (IMO) yang bisa memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi negara-negara berkembang agar sesuai dengan standar internasional," katanya.

Sementara itu, Ketua delegasi Indonesia yang dipimpin Herry Bakti, yang juga Staf Ahli Menteri Perhubungan, mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana kerjasama tersebut, apalagi Jepang terkenal dalam masalah kelautannya, termasuk bidang keselamatannya.

"Indonesia sendiri memang sedang memacu pembenahan sektor transportasi nasional, seperti pembuatan undang-undang keselamatan, baik moda angkutan udara, laut dan kini moda angkutan darat yang sedang dalam pembahasan," katanya.

Para delegasi yang ikut dalam konferensi padat umumnya dipimpin menteri transportasi. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal yang dijadwalkan hadir tidak datang, karena tidak

mendapat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhono, menyusul tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Sulawesi Selatan pada hari Minggu (11/1) lalu.

Organisasi internasional yang terlibat antara lain ASEAN, Komisi Eropa, ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), IEA (Badan Energi Internasional), IMO (Organisasi Maritime Internasional), Bank Dunia serta Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

Konferensi itu juga menyerukan kerjasama yang lebih nyata dari negara maju dan negara berkembang untuk menggunakan energi alternatif yang lebih luas lagi. (Antara)

5. Genosida di Gaza

Aksi brutal Israel di Gaza, Palestina, ternyata tidak hanya sebuah serangan belaka, tetapi merupakan agresi. Sekitar 1.000 orang warga Gaza tewas dalam agresi Israel hingga hari ke-20. Dari jumlah itu, 30 persen korban tewas adalah anak-anak. Ya, anak-anak yang tak berdosa. Yang tak tahu apa-apa tentang perang.

Lebih bengis lagi, mayat-mayat bocah Palestina yang bergelimpangan di jalan-jalan itu dibiarkan menjadi santapan anjing pelacak yang dibawa tentara Israel.

Tank-tank Israel pun dengan ganas melindas mayat-mayat perempuan dan orang tua yang menghalangi laju mesin perang Pemerintah Zionis Israel. Rumah sakit, sekolah, kantor media massa, pasar, fasilitas umum lain, serta fasilitas ibadah pun dibumihanguskan. Nyaris tak ada lagi tempat berlindung bagi masyarakat. Sebuah kebiadaban yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan lagi sekadar perang, tapi sebuah tindakan genosida.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah perbuatan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompoknya.

Tindakan genosida mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, dan melakukan tindakan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompoknya.

Genosida, ini adalah sebuah tindakan pembantaian besar-besaran yang dirancang secara sistematis terhadap satu suku bangsa. Tujuannya, apalagi kalau bukan memusnahkan bangsa Palestina.

Israel merasa mendapat angin setelah Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) gagal menyepakati resolusi. Dan, Amerika Serikat (AS) selalu berada di balik keputusan DK yang menyelamatkan Israel. Ironisnya lagi, sejumlah negara di Eropa yang menjadi sekutu AS ikut-ikutan membenarkan tindakan genosida model Israel.

Dari kasus ini, komunitas internasional harus ikut bertanggung jawab terhadap genosida di Jalur Gaza. Dunia harus memainkan peran positif agar PBB bisa mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri tindakan genosida di Gaza.

Israel tak ada bedanya dengan tindakan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Jerman era Adolf Hitler. Israel kini telah menjadi Nazi baru. Pemerintah Zionis Israel menutup mata dan telinga terhadap pogrom dan holocaust, sebuah perlakuan buruk yang mereka alami di kamp-kamp Nazi.

Jelas sekali bahwa Israel bertujuan menghancurkan Palestina sebagai sebuah negara. Sekaligus menunjukkan superioritas ras Yahudi atas negara-negara di kawasan Arab.

Israel adalah penjahat kemanusiaan yang telah melampaui batas. Dunia tidak bisa diam, diam, dan terus-menerus diam melihat kebiadaban ini. Masyarakat internasional harus memberikan perlindungan bagi Palestina agar tak musnah oleh genosida model Israel.

Pimpinan Pemerintah Israel dan panglima militer Israel harus diseret ke pengadilan HAM internasional sebagai penjahat perang yang melakukan genosida. (Republika)

6. Israel Diserang Habis-habisan di Majelis Umum PBB

Perserikatan Bangsa Bangsa (ANTARA News/AFP) - Israel diserang berbagai pihak dalam sidang darurat PBB Kamis waktu AS (Jumat pagi WIB) karena melecehkan hukum internasional menyusul serangan militer mautnya di Jalur Gaza, termasuk dengan menyerang rumah sakit, media massa dan gedung-gedung PBB.

"Gaza berkobar-kobar terbakar. Kawasan itu telah telah berubah menjadi neraka yang terbakar," kata Presiden Majelis Umum PBB ke -192, Miguel d'Escoto Brockmann dari Nicaragua.

"Pelanggaran hukum internasional yang melekat dalam serangan Gaza tercatat sangat baik: hukuman kolektif; penggunaan (kekuatan) militer yang sangat berlebihan; serangan terhadap warga sipil termasuk rumah-rumah, masjid-masjid, universitas-universitas, sekolah-sekolah," papar Miguel.

Sidang darurat Majelis Umum PBB yang dimintakan 118 anggota PBB yang tergabung dalam gerakan Non Blok, dilangsungkan setelah upaya Israel menghadang penyelenggaraan sidang dengan alasan soal prosedur gagal diterima forum.

Sejak Israel melancarkan Operation Cast Lead pada 27 Desember 2008 untuk menghentikan serangan roket Hamas, lebih dari 1.100 orang Palestina termasuk 355 anak-anak, terbunuh dan setidaknya 5.000 orang terluka, demikian keterangan para petugas kesehatan di Gaza.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB Asha-Rose Migiro menyatakan saat ini Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon tengah mengunjungi Israel untuk menyampaikan "protes keras dan kemarahannya" untuk kemudian menuntut penjelasan (pemerintah Israel) setelah Israel menembak hingga meluluhlantakan kantor PBB di Gaza dan menembaki gudang-gudang tempat penyimpanan bantuan yang sangat dibutuhkan (warga dan aktivis bantuan).

Serangan-serangan Israel telah membakar sisi sebuah rumah sakit dan melukai dua kamerawan dalam sebuah gedung yang menjadi tempat media massa internasional dan Arab (berbasis meliput Gaza).

Para duta besar negara-negara di PBB menunjukkan kecemasan sangat mendalam terhadap serangan-serangan terakhir Israel ke Gaza.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan pasukannya membom kantor PBB untuk membalas tembakan yang datang dari arah gedung (dimana PBB berada), sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh UNRWA, sebuah badan PBB.

Dari satu pembicara ke pembicara dalam sidang darurat MU PBB ini kritik silih berganti menyerang serangan terakhir Israel ke Gaza.

Mewakili Uni Eropa, Duta Besar Ceko untuk PBB Martin Palous menyatakan blok Eropa beranggotakan 27 negara "memprotes keras dan mengungkapkan kemarahannya atas berondongan tembakan Israel ke kantor PBB di Jalur Gaza dan menegaskan bahwa fakta itu telah diklarifikasi (benar)."

Miguel D'Escoto menyayangkan fakta bahwa ofensif Israel yang dilancarkan untuk menghentikan serangan militan Palestina yang kini memasuki hari ke-20, terus berlanjut padahal sudah ada seruan gencatan senjata minggu lalu dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Seruan yang tercantum dalam Resolusi 1860 itu sejauh ini sengaja diabaikan baik oleh Israel maupun Hamas yang menguasai Gaza.

"Bagi saya ini ironis bahwa Israel, sebuah negara (yang mempunyai keistimewaan) lebih dari negara-negara manapun (karena) mengantungi sebuah resolusi Majelis Umum (tahun 1948) yang mengesahkan keberadaannya, malah menghinakan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa," tandas D'Escoto.

"Pernyataan terakhir Perdana Menteri Olmert dengan mengingkari kewenangan Resolusi 1860 jelas menempatkan Israel sebagai sebuah negara yang melawan hukum internasional dan Perserikatan Bangsa Bangsa," tambahnya.

Untuk memenuhi permintaan sejumlah negara anggota Majelis Umum, Miguel D'Escoto membagikan sebuah rancangan resolusi tak berjilid yang menuntut adanya penghormatan penuh terhadap Resolusi 1860 dan menyerukan Dewan Keamanan menjamin "pelaksanaan penuh dan segera resolusi tersebut."

Dubes Israel untuk PBB Gabriela Shalev mengatakan Majelis Umum mengadakan sidang dengan melanggar ketentuannya sendiri, dengan menyatakan berdasarkan Piagam PBB, Majelis tidak boleh melibatkan diri dalam satu isu yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan yang sesungguhnya lebih berkuasa.

Dia meninggalkan ruang sidang dengan menyebutnya sebagai sebuah upaya yang sinis, penuh kebencian dan telah dipolitisasi untuk mendelegitimasi hak fundamental Israel dalam melindungi warga negaranya.

Namun, Dubes Iran Mohammad Khazaei menyerang Israel dengan mengatakan aksi Israel di Gaza itu adalah genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan seraya menyebut negara Yahudi itu tidak layak menjadi anggota PBB.

Sementara Dubes Malaysia Hamidon Ali mengusulkan resolusi yang diajukan Majelis harus berisi seruan gencatan senjata, penarikan mundur secepatnya tentara Israel dari Gaza,

penghentian blokade Israel ke kantong Palestina itu dan mengizinkan bantuan kemanusiaan sampai ke para korban konflik.

"Resolusi ini juga mesti menyeru pembentukan sebuah pengadilan (kejahatan perang) untuk menuntut siapapun yang bertanggungjawab dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akhirnya segala sanksi harus diterapkan tanpa kecuali," tegas Dubes Malaysia ini.

Sidang darurat Majelis Umum ini akan dilanjutkan Jumat (Sabtu WIB). Israel mengajukan syarat pengakhiran perangnya melawan Hamas di Gaza jika ada jaminan internasional bahwa para pejuang Palestina tidak lagi mempersenjatai diri dengan menyelundupkan senjata dari Mesir dan menghentikan serangan roketnya dari kantong Palestina. (Antara)

I . NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Pemimpin Indonesia Perlu Tiru Obama

Komunikasi antara presiden yang akan memerintah dan mantan presiden diperlukan di Indonesia. Seharusnya dengan budaya ketimuran, pemimpin Indonesia bisa meniru komunikasi politik Presiden AS terpilih Barrack Obama yang berkomunikasi dengan mantan presiden George W Bush.

"Saya tak punya motivasi politik apapun dalam membuat buku ini, saya tak pro ke siapapun. Semua Presiden saya kritik, tapi bukan orangnya hanya kebijakannya," kata Tjipta Lesmana di sela peluncuran bukunya "Dari Soekarno Sampai SBY" di Kemang Village, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Dikatakan Tjipta, semua kepemimpinan presiden RI itu memiliki bahasa komunikasi politik yang beragam. "Kalau Pak Karno itu istilahnya *all of order*, tetapi Pak Harto itu *cool*, manggut-manggut terus, sikapnya manggut-manggut tapi belum tentu menyatakan persetujuan," katanya.

Ditambahkannya, dalam masa pemerintahan Habibie itu emosional tapi tak pendendam, sedangkan Soeharto lebih pendendam. "Tapi dia tak konsisten, bisa dilihat dalam kasus Bank Bali dan Timtim, hampir sama dengan Gusdur yang juga *no order*, inkonsistensi sangat tinggi, paling tidak pendendam," katanya. "Kalau Megawati selalu tersenyum tapi menyerahkan semua keputusan pada menteri yang berada di departemen masing-masing," sambungnya.

Sementara untuk pemerintahan SBY, menurut Tjipta, lebih peragu dan tidak tegas. "Meski dia militer tapi dia bukan jenderal sejati karena tak menunjukkan ketegasan, seperti M Yusuf dan Ryamizard Ryacudu," jelas Tjipta. (Kompas)

B. EKONOMI :

1. Pemerintah Berikan Tiga Macam Stimulus

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan tiga macam stimulus kepada sektor riil, yakni bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP), pajak pertambahan nilai (PPN-DTP), dan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPH-DTP).

Stimulus ini bertujuan agar perekonomian tetap bergerak dan bisa menahan laju pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari Rp 12,5 triliun, kita sudah pastikan Rp 2,5 triliun untuk BM-DTP. Karena tidak semua bisa dikasih PPN-DTP, maka yang Rp 10 triliun dicarikan cara lain, yakni dengan PPH-DTP," kata Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam acara perkenalan pengurus Kadin Indonesia 2008-2013, di Jakarta, Kamis (15/1).

Dia mengatakan, PPN-DTP ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya, karena terkait mekanisme pelaksanaan, baik di tingkat pengusaha maupun di Ditjen Pajak. Untuk itu, pemerintah memutuskan memberikan PPH-DTP yang terdiri dari PPh 25 dan PPh 21. Stimulus PPh 25 berarti pajak yang diterapkan untuk perusahaan akan ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan untuk pegawai perusahaan dan itu akan ditanggung oleh pemerintah. "Kalau untuk PPh 25 bisa diterapkan oleh semua perusahaan dan akan segera dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tapi kalau PPh 21, kita masih akan membahas siapa saja yang akan mendapatkannya," tutur Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah akan benar-benar mengkaji dan melihat situasi perusahaan. Yang mungkin mendapatkan PPh-DTP tersebut adalah perusahaan yang penjualannya menurun. BM-DTP dan PPN-DTP diberikan kepada sektor bahan bakar nabati, garmen, otomotif, pertanian, energi, telematika, alat berat. Untuk PPh 25 semua mendapatkan penangguhan dan PPh 21 diberikan hanya kepada sektor terpilih saja atau yang benar-benar menghadapi PHK.

Terkait pengurangan dana stimulus dari Rp 50,5 triliun menjadi Rp 27,5 triliun, Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. "Kita jadinya memberikan stimulus Rp 27,5 triliun, itu karena defisit anggaran ternyata membesar setelah dilakukan perubahan asumsi makro," katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap akan mempertahankan subsidi energi dan pangan yang terkait langsung dengan konsumsi masyarakat. Secara umum, pemerintah juga akan menggunakan seluruh sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2008 sejumlah Rp 51 triliun, meski tetap menunggu persetujuan DPR.

Untuk menjaga anggaran, pemerintah juga tidak akan segan meningkatkan pinjaman luar negeri. Namun, dalam situasi krisis finansial global, tentu tetap tidak mudah mendapatkannya, karena negara lain mengeluarkan surat utang untuk menutup defisit anggarannya.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, departemen, instansi pemerintah atau kementerian yang memang memiliki proyek infrastruktur dimungkinkan mengajukan penambahan anggaran. Namun, ini dengan syarat proyek sudah bisa dilaksanakan pada Maret 2009. "Jadi kalau ada menteri yang mau minta tambahan anggaran, boleh saja. Tapi, syaratnya permintaan tambahan anggaran hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Karena itu, tawaran penambahan anggaran memang disampaikan kepada departemen, instansi, dan kementerian tertentu, karena tidak semuanya berkaitan dengan infrastruktur. "Ya, ini saya sampaikan terutama kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum, yang memang anggarannya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tapi, tetap penambahan anggaran disesuaikan dengan kemampuan," ujarnya.

Terkait hal ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan, stimulus ekonomi yang diusung pemerintah diharapkan dapat benar-benar tepat sasaran. Apalagi di saat belum dijalankan, pemerintah sudah merevisi nilai stimulus yang semula Rp 50,5 triliun menjadi Rp 27,5 triliun. Dalam hal ini, sektor-sektor usaha yang akan diberi stimulus harus benar-benar yang menjadi prioritas. "Tentunya sektor yang rawan terhadap pengurangan tenaga kerja," kata Hidayat.

Menurut dia, Kadin Indonesia tidak terlalu mempermasalahkan soal turunnya besaran stimulus. Pasalnya, pemerintah mungkin sedang dalam posisi mencari angka yang pas untuk mendapat persetujuan DPR serta terkait juga adanya perubahan asumsi dalam penerimaan penerimaan negara.

"Kalau stimulus tepat sasaran, kami yakin jumlah pengangguran bisa ditekan," ujarnya. (Suara Karya)

2. UE Cabut Larangan Terbang Paling Lambat Juni 2009

Uni Eropa (UE) berjanji untuk mencabut larangan terbang terhadap maskapai penerbangan Indonesia pada Maret atau Juni 2009.

Janji tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Delegasi Komisi Eropa untuk Indonesia, Julian Wilson, ketika diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Juru bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri, Dino Pati Djalal mengatakan Julian menyampaikan optimismenya kepada Presiden Yudhoyono bahwa larangan terbang itu akan dicabut paling lambat Juni 2009.

"Julian mengatakan Uni Eropa merasa optimis dalam pertengahan tahun ini larangan terbang itu sudah dapat diangkat. Ada dua kemungkinan, Bulan Maret atau Juni," tutur Dino.

Menurut Dino, Julian mengatakan larangan terbang itu bukan masalah politis melainkan hal teknis semata, sehingga larangan terbang itu akan dicabut setelah Uni Eropa dan Indonesia menyelesaikan berbagai aturan teknis yang masih mengganjal.

Dino mengatakan, Julian pada pertemuan dengan Presiden menyampaikan apresiasi Uni Eropa terhadap UU Penerbangan yang sudah disahkan oleh Parlemen Indonesia guna menjamin keselamatan penerbangan yang diselenggarakan oleh maskapai Indonesia.

UE, lanjut Dino, menilai pengesahan UU Penerbangan itu sebagai faktor penting yang dapat mempercepat pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia untuk melintasi wilayah Eropa.

Pada pertemuan dengan Presiden, Dino menjelaskan, Julian juga menyampaikan penghargaannya terhadap kerjasama pihak Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah larangan terbang tersebut.

Menurut Dino, Presiden dalam pertemuan dengan Julian Wilson menyambut baik rencana Uni Eropa untuk mencabut larangan terbang terhadap maskapai penerbangan Indonesia.

Presiden mengatakan larangan terbang tersebut selama ini sangat mengganggu usaha penerbangan Indonesia dan juga menghambat promosi pariwisata Indonesia di Benua Eropa.

Julian Wilson melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai kepala delegasi Komisi Eropa di Indonesia.

Bersamaan dengan Julian, Presiden juga menerima kunjungan kehormatan Kepala Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, El-Mostafa Benlamlah.

Dino menjelaskan, Presiden dan Benlamlah membahas situasi di Jalur Gaza dan kerjasama untuk menanggulangi masalah perubahan iklim.

Kepada Benlamlah, Presiden menyampaikan harapan agar resolusi Dewan Keamanan PBB dipatuhi oleh Israel untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera di Jalur Gaza. (Antara)

3. Pemerintah Ancam Pidanakan Exxon

Pemerintah mengancam akan mempidanakan ExxonMobil jika tidak mengembalikan seluruh data pengembangan Blok Natuna D Alpha.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Jumat mengatakan, UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan data hasil eksplorasi dan eksploitasi merupakan milik dan dikuasai negara.

"Kalau ada kontraktor termasuk Exxon yang tidak mengembalikan data, maka bisa dipidanakan. Kalau Exxon main-main, saya akan pidanakan," ujarnya.

Menurut dia, sesuai UU Migas, kontraktor bisa terkena pidana berupa kurungan selama satu tahun dan denda paling tinggi Rp10 miliar.

Purnomo juga mengatakan, data pengembangan Natuna tidak terlalu banyak karena baru empat sumur yang dibor dan berlangsung sudah cukup lama yakni antara 1980-1983.

PT Pertamina (Persero), lanjutnya, tidak memiliki alasan tidak memiliki data, sebab BUMN tersebut merupakan mitra Exxon dan memang baru empat sumur yang dibor.

"Tidak ada data tambahan lagi," katanya.

Kepala BP Migas R Priyono menambahkan, saat perubahan kepemilikan Natuna tahun 1996, Pertamina juga sudah memiliki data tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen ESDM Farida Zed mengatakan, sejauh ini, Exxon telah mengembalikan data pengembangan empat sumur tersebut.

"Exxon sudah serahkan datanya. Namun, kami terus komunikasikan dengan Exxon, kalau masih ada data lainnya, akan kami minta," katanya.

Mengenai kemungkinan Exxon mengajukan arbitrase, Purnomo mengatakan, pemerintah memiliki dasar yang kuat yakni kontrak secara otomatis berakhir, karena belum ada "commercial viability" (ekonomis untuk dikembangkan).

Sesuai kontrak, pengajuan komitmen pengembangan lapangan hanya bisa diterima kalau BP Migas dan kontraktor bersama-sama sepakat lapangan ekonomis dikembangkan berdasarkan studi kelayakan.

"Karena belum ada 'commercial viability,' maka kontrak secara otomatis berakhir pada 9 Januari 2005," ujarnya.

Wakil Direktur ExxonMobil Oil Indonesia Maman Budiman mengatakan, pihaknya tetap berketetapan kontrak Exxon di Natuna masih berlaku.

Exxon, lanjutnya, juga tetap berkomitmen mengembangkan Natuna secara efisien bersama Pertamina seperti yang tercantum dalam kontrak tertulis.

Menurut dia, pihaknya akan membawa kemampuan teknologi dan pengalaman mengelola proyek gas skala besar dan sulit seperti Natuna. (Antara)

4. Industri Tekstil ASEAN Setuju Supply Change

ASOSIASI Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Asean setuju melakukan perubahan rantai pasokan (*supply change*) untuk bertahan menghadapi penurunan permintaan akibat krisis finansial global.

"Baru minggu lalu para pelaku usaha industri TPT ASEAN yang tergabung dalam asosiasi terkait di negara masing-masing melakukan pertemuan. Kita sepakat *supply change* nanti," kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), E G Ismy, seperti dikutip *Antara*, di Jakarta, Kamis (15/1).

Dia mengatakan, di ASEAN masing-masing negara memiliki kekuatan sendiri dalam pertekstilan, seperti Malaysia memiliki kekuatan di garmen dan kain. Lalu, Singapura logistik, dan Indonesia cukup kuat baik di garmen, kain, benang, maupun bahan baku.

Saat ini, Vietnam, Laos, Kamboja, memiliki kekuatan bidang garmen tetapi mereka tidak kuat di kain. Padahal, permintaan dari Uni Eropa (UE) di negara mereka justru mengalami kenaikan 40 persen.

Untuk itu, para pelaku usaha di industri ini, sepakat saling mendukung. Negara seperti Indonesia dan Malaysia yang kuat di kain akan mengirimkan suplai ke tiga negara yang mendapat pesanan garmen dari UE itu. "Negara yang kuat di bahan baku seperti Thailand dengan polyester mensuplai negara yang tidak terlalu kuat di bahan baku," ujar dia.

Secara detil bagaimana pelaksanaannya, masih dilakukan pertemuan untuk koordinasi secara *business to business* (B to B). Kerja sama model ini akan lebih cepat terasa manfaatnya bagi masing-masing pelaku usaha jika tidak terlalu luas. "Karena itu lah para pelaku usaha sektor TPT ini setuju melakukannya di tingkat regional. Jadi di kawasan saja, bila perlu dalam bentuk bilateral seperti Indonesia dengan Jepang." (Jurnal Nasional)

C. SOSBUD

:

1. Erman Surati Saudi Soal TKI

MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno melayangkan surat protes kepada Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia terkait kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Korban penganiayaan itu adalah Keni, warga Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dia disiksa majikannya saat bekerja sebagai TKI di Madinah, Arab Saudi. Selain pukulan dan tendangan, sekujur tubuh Keni juga mengalami luka bakar serius hingga tumbuh keloid.

Saat ini, Keni masih dirawat insentif di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta. "Ini adalah kasus penganiayaan. Kami sudah mengirimkan surat kepada Dubes Arab Saudi dan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri," kata Erman saat memberikan santunan kepada Keni.

Menurut dia, penyelesaian hukum atas tindakan penganiayaan ini perlu melibatkan kedua instansi tersebut. Sebab, hal ini terkait hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

Erman juga mengatakan pihaknya mendorong pemenuhan gaji oleh perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Keni. Demikian halnya dengan perusahaan asuransi. (Sindo)

D. HANKAM

:

1. Korvet KRI Diponegoro Ditugaskan dalam Satgas Perairan UNIFIL

Kairo, 16/1 (ANTARA) - Sebanyak 120 personel TNI siap menjadi bagian dari gugus satuan tugas (Satgas) perairan di Lebanon atas nama Pasukan Perdamaian Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), dan dijadwalkan akan bertolak akhir Januari 2009 dengan Kapal Republik Indonesia (KRI) Diponegoro untuk menuju Kairo, Mesir.

"Setelah sampai di Kairo, Mesir, yang diperkirakan pada 10 Pebruari 2009, KRI Diponegoro dengan seluruh pasukan akan dikirimkan ke Perairan Lebanon bersama pasukan lainnya pada akhir Juni nanti, seperti dari Jerman, Italia, Spanyol, Inggris dan lainnya dengan bendera UNIFIL," kata Atase Pertahanan (Athn) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Kolonel Laut (E) Ir Sigit Soekirno S kepada ANTARA di Kairo, Jumat.

Ia menjelaskan, pada 5 Januari 2009, ia mendampingi tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Mabes TNI yang beranggotakan empat orang dan dipimpin oleh Letjen TNI Liliek AS Sumaryo mengadakan kunjungan ke markas kontingen Garuda (Konga) di Lebanon.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wadan Sektor Timur Kolonel (Inf) Bambang Sudiono, Dansatgas Konga XXIII-C/UNIFIL Letkol (Inf) R Haryono, Dansatgas Konga XXV-A/UNIFIL Letkol (CPM) Ujang Martenis beserta beberapa perwira lainnya.

Anggota tim Itjen Mabes TNI tersebut terdiri atas Irjen Letjen TNI Liliek AS Sumaryo, Mayjen TNI Supiadin AS (Asisten Operasi Panglima TNI), Marsma TNI Bambang Purwadi, S.IP (Waaslog Panglima TNI), dan Kolonel (Inf) Moch Haryanto (Paban IV/Sops TNI). Mereka didampingi oleh Penasehat Militer RI di UNDPKO New York Laksma TNI I Putu Yuli Adnyana dan dirinya.

Dijelaskannya bahwa selama ini pasukan TNI di UNIFIL dikenal mampu bersikap profesional sebagai pasukan penyangga dan bersikap netral dalam mengamankan zona konflik Lebanon dengan Israel.

"Karena itulah, pasukan TNI mendapat apresiasi dari penduduk maupun dari PBB sendiri," katanya. KRI Diponegoro merupakan salah satu korvet terbaru yang dimiliki TNI AL.

Kirim ADO

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesiapan Indonesia untuk berperan-serta menjadi peninjau militer dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza, seperti pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, ia menjelaskan bahwa untuk hal itu, pihaknya telah mengirimkan analisa daerah operasi (ADO) kepada Mabes TNI.

"Saya memang sudah menerima informasi tentang hal itu, dan telah mengirimkan ADO ke Mabes TNI," kata Sigit Soekirno S, lulusan AKABRI Laut tahun 1983 itu.

Diakuinya bahwa konflik di Gaza itu mempunyai kompleksitas masalah yang rumit, dan Mesir sebagai satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, juga punya dilema sendiri.

"Tekanan-tekanan dalam negeri dari pihak oposisi, cukup merepotkan pemerintah," kata Athan yang sudah bertugas dua tahun di Kairo, dan wilayah kerja operasionalnya mencakup 13 negara di Timteng itu.

Ia memberi contoh bahwa persoalan terowongan -- yang bisa dianggap bahwa Mesir membiarkan adanya terowongan itu menjadi jalan bagi pejuang Palestina, sehingga bombardir pesawat tempur Israel terus menghujani daerah itu--kini juga menjadi wacana yang dipersoalkan.

Awal pekan (12/1) ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa personel TNI untuk menjadi peninjau militer, jika terjadi gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

Ditemui usai mendampingi Panglima Angkatan Bersenjata Australia Marsekal Allan Grant (Angus) Houston bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Jakarta, Panglima mengatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam proses perdamaian di Jalur Gaza, termasuk untuk memantau gencatan senjata jika diminta PBB.

"Kita siap dengan apa yang bisa kita lakukan," katanya. (Antara)

E. HUKUM

1.Lemhannas Setuju Kenaikan Anggaran Pertahanan

TAMBAHAN anggaran pertahanan mutlak dilakukan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi meminta Departemen Keuangan (Depkeu) benar-benar mengkaji

tambahan dana pertahanan senilai Rp460 miliar yang diajukan Departemen Pertahanan (Dephan).

"Harus ada pertimbangan khusus untuk sektor pertahanan. Harus ditambah uangnya, jangan sampai dipotong," kata Muladi usai menerima Penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Kamis (15/1).

Menurutnya, beban yang harus ditanggung Dephan dan TNI cukup berat karena bertanggung jawab menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tidak saja ancaman aktual, kejahatan tradisional seperti terorisme, separatisme, dan kegiatan ilegal juga mengancam. Terlebih Indonesia akan menghadapi pemilu.

"Potensi ancaman pertahanan pasti meningkat," katanya. Dalam APBN 2009, alokasi dana Dephan dan TNI hanya sebesar Rp33,6 triliun. Anggaran tersebut masih harus dikurangi potongan sepuluh persen pada dua hingga tiga bulan ke depan.

Muladi mengungkapkan, sebenarnya dana tambahan yang diajukan Dephan masih terlalu kecil. "Itu hanya untuk operasi rutin," kata mantan rektor Universitas Diponegoro itu. Pasalnya, mayoritas dana APBN akan habis untuk gaji dan tunjangan prajurit. Kecil sekali anggaran untuk pengadaan senjata baru. Apalagi, alokasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Mau tidak mau, kata Muladi, penurunan anggaran berdampak pada pemeliharaan dan kesiapan senjata, dan pengadaan alat utama sistem senjata baru, peningkatan kemampuan prajurit, serta kegiatan operasi pertahanan keamanan.

Tak hanya ancaman nasional, Indonesia masih ketinggalan dalam perimbangan kekuatan pertahanan kawasan regional. Dia mengatakan, persenjataan yang dimiliki sudah tertinggal dibanding Malaysia dan Singapura. Apalagi jika dihadapkan dengan Australia.

"Ini membuat kita sering dianggap remeh," katanya. Inspektur Jenderal (Irjen) Dephan Letjen Safzen Noerdin menambahkan, dengan keterbatasan dana, departemennya terus berupaya memperbaiki laporan keuangannya.

"Jangan sampai sudah kurang, masih diselewengkan," katanya. Dia mengakui, tidak mudah mengawasi dana pertahanan karena struktur militer yang besar dan tersebar di seluruh pelosok. "Tapi kami sudah berkomitmen menjunjung transparansi," kata Safzen.

Hal senada diungkapkan Irjen TNI Letjen Liliek AS. Menurutnya, paradigma keterbukaan TNI sudah dimulai sejak 10 tahun lalu. Sehingga, amanat reformasi seperti transparan, akuntabel, efektif, dan efisien harus dipatuhi. "TNI terus berbenah," katanya. (Jurnal Nasional)

F. OLAH RAGA :

1. Pia and Adrianti handed tough matches

Indonesian singles players have a daunting task in the second round of the South Korean Super Series badminton championship at the Olympic Gymnasium in Seoul on Thursday.

Pia Zebadiah Bernadet, who beat Malaysian Cheah Lydia Li Ya 21-9, 21-16 on Wednesday, faces world No. 2 Tine Rasmussen of Denmark while Adrianti Firdasari, who drew a bye in the first round and will open her bid against fifth seeded and rising star Saina Nehwal of India.

Coach Marleve Mainaky said he would have to provide extra support to his players in order to instill them with confidence.

"Indeed, they are fighting tough opponents. They must keep calm in order to control the game tomorrow," Marleve said via text message.

In the men's singles, Simon Santoso and Andre Kurniawan Tedjono marched to the second round and are set for Malaysian opposition -- Simon taking on Chong Wei Feng and Andre tackling Mohammad Arif Abdul Latif.

Simon was beaten in the quarterfinals in Kuala Lumpur last week by Malaysian Kuan Beng Hong 21-12, 21-16, while Andre struggled part Kenichi Tago of Japan 14-21, 21-18, 21-18.

Indonesia lost two men's doubles pairs - Fernando Kurniawan and Lingga Lie, and Rendra Wijaya and Joko Riyadi but the majority marched through.

Alvent Yulianto Chandra and Hendra Apriadi Gunawan eliminated hosts Chung Eui-seok and Ki Dae-eun 21-15, 21-19. Muhammad Ahsan and Bona Septano ousted Mongolians Zolzaya Munkhbaatar and Enkhbat Olonbayar 21-7, 21-2.

Alvent and Hendra will be challenged by Malaysians Choong Tan Fook and Lee Wan Wah while Ahsan and Bona will face Rasmus Bonde and Mikkel Delbo Larsen of Denmark.

The team can also rest hopes on world No. 1 Markis Kido and Hendra Setiawan, who drew a bye in the first round and will play Fang Chieh Min and Lee Sheng Mu of Taipei in their opening match.

All three Indonesian mixed pairs had byes and will take to the court Thursday. (The Jakarta Post)

2. Timnas PSSI Kalahkan Al-Shabab 3-2

Jakarta (ANTARA News) - Timnas sepakbola Indonesia melaksanakan partai uji coba melawan klub Divisi I Al Shabab, Kamis malam, waktu setempat, jelang laga perdana Pra Piala Asia 2011 melawan tuan rumah Oman pada 19 Januari mendatang.

Asisten Timnas Indonesia, Chandra Solehan yang dihubungi, Jumat dinihari menyebutkan, Timnas menang 3-2. Gol Indonesia dicetak oleh Budi Sudarsono menit ke-14 dan dua gol oleh Bambang Pamungkas di menit ke-35 dan 55.

Al Shabab yang diperkuat empat pemain asing memasukkan dua gol. Sebelumnya, Timnas juga telah melaksanakan dua kali uji coba melawan Liga Asing Selection 0-0 dan Pelita Jaya U-21 3-1.

Namun, Chandra menyatakan suhu di Muscat cukup dingin, dengan temperatur mencapai 14 derajat Celcius.

"Sudah dua hari ini Oman diguyur hujan sepanjang hari. Sudah satu tahun ini Oman tidak pernah hujan, bahkan suhu sempat anjlok hingga 14 derajat Celcius," katanya.

Sementara kesebelasan Oman yang menjadi lawan Indonesia di Pra Piala Asia ini harus menyelesaikan partai final Piala Teluk 2008 pada Sabtu (17/1) melawan Arab Saudi.

Oman melaju ke final setelah menekuk Qatar 1-0 pada Rabu malam waktu setempat, sementara Arab Saudi mengalahkan Kuwait 1-0.

Kemenangan Oman di partai semifinal itu berkat gol tunggal yang dicetak pemain andalannya Hasan Rabia Al Housni di menit ke-19, sedang kemenangan Arab Saudi diciptakan oleh Ahmed Al Fraidhi menit 63. Partai semifinal Oman ini sempat disaksikan langsung oleh Pelatih Timnas Indonesia Benny Dollo. (Antara)

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Indonesian sky less polluted, govt claims

The government claims to have significantly cut the country's greenhouse gas emissions, contradicting international reports that rank Indonesia among the world's top polluters.

A draft report by the government says the country's total emissions between 2000 and 2006 averaged around 640,000 gigatons of carbon dioxide (CO2) per year, compared to 950,000 gigatons in 1994.

"But, we still need to factor in emissions from peatland sources into our calculations before launching the report hopefully in March," Masnellyarti Hilman, deputy director for nature conservation enhancement and environment degradation control at the environment minister office told The Jakarta Post on Wednesday.

The forestry and energy sectors remained the main polluters, contributing to 72 percent of the country's total emissions.

The draft report places solid waste as the second-worst polluter with 16 percent, followed by the agriculture and industrial sectors contributing 8 and 4 percent respectively.

Indonesia's most recent inventory of greenhouse gas emissions was conducted in 1994 and the report was submitted to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1999.

The UN requires wealthier signatory nations of the Kyoto Protocol to submit their emission inventory data every year.

Developing countries, including Indonesia, can voluntarily submit a national communication report. The emission reports are used by countries to devise strategies to deal with the impacts of climate change.

The British Department for International Development and Consultancy firm Peace said Indonesia's rapid deforestation meant it ranked third worst globally for emitting greenhouse gases.

The world's largest emitter, the United States, releases 6,000 million tons of CO₂ annually, followed by China with 5,000 million tons. The majority of the emissions in both countries originated from the energy sector.

Indonesia's annual emissions are mainly generated from land use and forest destruction.

Conservation group Wetlands International claimed Indonesia's greenhouse emissions from peatland reached 2 billion tons of CO₂ per, exceeding emissions from India and Russia and almost tripling the annual emissions of Germany or Britain.

The government has repeatedly denied such reports but failed to provide alternative data.

Speaking at the business forum organized by the policy consultant PT Strategic Asia Indonesia, Masnellyarti said the government planned to further cut the country's emissions in all sectors.

"The implementation of the 2006 presidential decree on energy will cut 17 percent of the country's emissions from the energy sector," she said.

In addition, the use of geothermal energy as an alternative source could also help slash the energy sector's emissions by 20 percent.

"If we use carbon capture and storage (CCS) technology, we could cut about 40 percent of energy emissions," she said.

She said the government would increase carbon absorption through forest rehabilitation and reducing forest fires.

Masnellyarti also called on the business community to preserve power in the office by simply taking a little extra care, saying her office had reduced 25 percent of its budget through energy saving programs.

"If all offices and houses save energy, we will continue to reduce emissions," she said. (The Jakarta Post)

III. ARTIKEL :

1. UU BHP Tidak Meliberalisasi Pendidikan oleh Sukemi

PRO-KONTRA menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang (UU) sepertinya belum juga mereda. Mereka yang kontra berpandangan antara lain, kalau UU itu kurang disemangati oleh pengakuan atas eksistensi swasta, sehingga ada pasal-pasal yang diibaratkan seperti "pedang achilles" yang memotong urat kaki sekolah swasta. Lainnya, beranggapan, UU itu merupakan upaya untuk melakukan liberalisasi kebijakan pendidikan (*education policy*).

Sementara mereka yang pro berpendapat, UU BHP merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat atau peserta didik dari jerat para penyelenggara lembaga pendidikan yang diselenggarakan dengan semangat bisnis semata dan dalam rangka reformasi penyelenggaraan pendidikan, sebagai badan hukum nirlaba yang profesional.

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan "pembelaan" terhadap mereka yang pro, tapi lebih pada bagaimana mendudukan persolaan yang sebenarnya, karena jika menyimak dari pernyataan mereka yang kontra, rasanya tidak seluruhnya benar, mengingat beberapa pasal yang dianggap akan menjadikan lembaga pendidikan meliberalisasikan lembaganya sangat bertolak belakang.

Empat Alasan

Sedikitnya ada empat alasan yang dapat disampaikan untuk memperjelas kalau UU BHP tidak akan meliberalisasi lembaga pendidikan.

Pertama, sebagai badan hukum nirlaba, BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan (Pasal 4). Seandainya BHP mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatannya, maka keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau

mutu layanan (Pasal 37 ayat 6, Pasal 38 ayat 3, Pasal 42 ayat 6). Jika ini dilanggar, diancam baik dengan sanksi administratif (Pasal 60, 61 dan Pasal 62) maupun sanksi pidana (Pasal 63).

Kedua, BHP menjamin dan membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi (pasal 40 ayat 3). Bahkan, BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pasal 41 ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, BHP menyediakan paling sedikit 20 persen peserta didik mendapatkan pendidikan gratis bagi yang tidak mampu secara ekonomi (Pasal 46 ayat 2).

Ketiga, dalam UU BHP ada ketentuan, BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik (Pasal 46 ayat 1 dan 2).

Keempat, BHP pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak boleh memungut dana berlebihan dari masyarakat, maksimal 1/3 (satu pertiga) biaya operasional (Pasal 41 ayat 8 dan 9). Selain peserta didik yang memperoleh beasiswa, peserta didik lainnya hanya membayar sesuai dengan kemampuan dalam pembiayaan (Pasal 41 ayat 7). Ini karena seluruh biaya investasi, infrastruktur, alat, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi semuanya ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 41 ayat 1, 3 dan 5).

Tetap Diakui

Dari empat alasan itu, dapat disimpulkan, ketentuan dalam pasal-pasal UU BHP sesungguhnya menggambarkan kalau BHP sangat menghindari terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi dalam pendidikan. Artinya, sangat berlebihan jika ada anggapan di sebagian masyarakat kita yang menyatakan kalau UU BHP akan menjadikan lembaga pendidikan menjalankan praktik-praktik liberalisasi.

Sedang terhadap anggapan UU BHP kurang disemangati oleh pengakuan atas eksistensi swasta, sehingga ada pasal-pasal yang diibaratkan seperti "pedang achilles" yang memotong urat kaki sekolah swasta, rasanya juga tidaklah benar, karena sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 67 ayat 1 sampai 5, jelas ditegaskan kalau UU ini tetap mengakui eksistensi para pengelola pendidikan swasta. Bahkan lebih dari itu, ketika akan mengubah menjadi BHP dalam proses melakukan perubahan akta pendirian - sebagai konsekuensi hukum menjadi badan hukum nirlaba - pemerintah harus memberikan bantuan pembiayaan untuk perubahan itu.

Pada titik ini, maka pro-kontra terhadap disahkannya RUU BHP menjadi UU adalah sebuah kewajaran yang menuntut untuk terus menerus dilakukan upaya sosialisasi, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Anggota Tim Penyusun Bahan Sosialisasi UU BHP. (Jurnal Nasional)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k

Ada

V. EDITORIAL :

1. The President's piece of cake

Lowering the prices of such basic commodities as fuel is a populist measure which does not require much explaining nor approval from the parliament. Such a policy can also make way for political goodies which any president facing reelection needs plenty of.

It was understandable when President Susilo Bambang Yudhoyono, who is facing an election year, snapped up the opportunity created by the steady fall in international oil prices to cut the

administered prices of fuels for the third time in six weeks. But whether the measure would support the government's energy conservation and diversification program remains a big question. The price cut could instead increase the economy's dependence on fossil-based fuels if the measure is decoupled from a comprehensive, long-term program to diversify fuels into renewable energy such as biofuel.

We find it hard to understand why the government has not yet decided to permanently peg domestic fuels to international oil prices and set up a floating price mechanism as part of such a comprehensive energy program.

Subsidies for the poor are better distributed through specifically targeted programs. The government did pledge to adjust fuel prices monthly to correspond with international crude oil prices, but within fixed price bands which cap the gasoline price at a maximum of Rp 6,000 (US \$0.50) per liter and the automotive diesel oil price at Rp 5,500.

That means if international crude oil prices increase to, say, \$60 per barrel, our domestic fuel prices will automatically adjust until they reach their respective price caps. Put another way, gasoline and diesel oil will be subsidized only when their prices rise above the price caps.

But this is not a free float in the real sense. And the government's political courage to make an upward adjustment has yet to be tested. The easiest part is making downward adjustments, as the government has done three times since last month. Bringing down prices? A piece of cake.

But raising prices is something else again. President Megawati Soekarnoputri decided in 2002 to fully float domestic fuel prices on international ones through monthly adjustments. But when international market developments mostly required upward price adjustments, she abandoned the float in 2004 with the presidential election looming. She lost anyway, to Yudhoyono.

The monthly price adjustments and the price bands the government announced Tuesday seem to be tied mainly to oil, not integrated into a long-term energy strategy.

We should remember that oil prices tend to be highly volatile and vulnerable to both speculation as well as political and security conditions in the Middle East.

Market forces, we think, remain the most powerful mechanism to drive energy efficiency and conservation. Market mechanisms obviously have an immediate bearing on the viability of investments in fuel efficiency programs, forcing large-scale users to turn to the most energy-efficient machinery.

But to be effective, energy diversification and fuel efficiency programs should be integrated into a comprehensive energy strategy for the development of renewable energy sources. (The Jakarta Post)

2. Press uncertainty in 2009

The Indonesian press enters the election year with uncertainty as a growing number of less bonafide newspapers and untrained reporters come into the market while the election law is ready to send journalists to prison.

Because of Indonesia's style of democracy – maybe this is the only country in the world which holds local elections on average every two days – lots of candidates find themselves locked in marriages of convenience with “editors” who would be very happy to print anything for money.

The Kompas editorial (Dec. 30, 2008) noted there were 139 local elections, for gubernatorial, mayoralty, and regent/ district chief levels, in 2008 alone.

At least 10 articles in the election law can send journalists to prison on top of the 35 articles of the draconian penal code — a legacy of the Dutch colonial period — which the police love to use, plus other laws including the Electronic Transaction Information Law.

The General Elections Commission (KPU) said more than 11,300 candidates from 34 political parties were competing in the national parliamentary elections in April vying for the 550 parliamentary seats. The presidential elections follow in July.

Before the fall of former president Soeharto in 1998, when a license was required to publish a newspaper, there were only 289 print media across the country. According to the Newspaper Publishers Association (SPS), there are now more than 800 print media; one half of them are its members.

However, that is only an approximate figure because some newspapers publish once or twice and then die, or they reappear weeks or months later under different names. So no one knows how many newspapers actually exist in Indonesia, maybe not even God.

Some tabloids are allegedly extorting money by blackmailing private companies or “dirty” officials in order to survive.

According to Leo Batubara of the SPS, only 30 percent of the print media in Indonesia are healthy, management-wise; of the remaining 70 percent, half are “sick” and the rest are waiting for their requiems. Since the number of “sick” newspapers is much, much higher than the mainstream media, the public, who mostly cannot see the difference between the two, often generalize and blame all newspapers as if they are all already kebablasan, excessive, overdoing it.

Despite the large number of “sick” print media, the biggest portion of Indonesia’s 19 million total newspaper circulation in 2008 was still provided by the mainstream, 7.1 million, according to the SPS.

The disobedience of some journalists to the code of ethics and the violations of the press law by a number of media outlets has angered sections of the public, who cannot see the difference between the mainstream and the gutter press. Strongest protests, particularly against pornography, came from organizations like the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Anti-Pornography Society.

The Press Council finally urged the SPS to draft its own regulations in order to protect the public and itself. In late November 2008, many adult magazines began to put an extra sheet of paper or black plastic to conceal the “interesting” parts of their cover page.

During the Soeharto era newspapers were only published in the provincial capitals. Today every kabupaten (regency/district) capital has at least one or two regularly published dailies and between four and 10 irregularly published dailies or tabloids. Indonesia now has some 520 regencies, 90 towns and at least 55 administrative towns.

It is encouraging to see that newspapers have reached a much wider readership. The problem is what kind of information people get. It has become a common practice throughout the country that bupati (regents/district chiefs) have contracts with one or two of their respective local dailies or tabloids to publish two pages per issue about their regencies, at Rp 2 million per page. Thus in a month the tabloid earns Rp 4 million per issue, or Rp 16 million per month, and it could conveniently continue publishing every week without advertisements.

But with such a lucrative contract, could the particular paper still be expected to publish objective and impartial stories about their bupati or kabupaten? Could it still be expected to carry out its social control function? There is a saying in Indonesian which means, “A dog will not bite the hand of the person who feeds it”.

It is also a common practice among provincial governors and regents to allocate a certain amount of the local budget to finance their own media, generally managed and operated by their respective public relations officers as chief editors; and they issue press cards.

It is not strange, therefore, to see that those newspapers support their respective masters. And it is in such a condition the Indonesian press enters the election year. (The Jakarta Post)

3. Menghapus Kesan Buruk Ketua MA Terpilih

SUDAH menjadi hukum alam bahwa setiap keputusan akan disikapi pro dan kontra. Karena itu tak perlu kaget saat muncul berbagai nada kritis terkait terpilihnya Harifin A Tumpa sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA).

Begitu juga terhadap dukungan yang muncul pada Harifin. Semua itu adalah fenomena biasa dalam negara demokrasi. Dalam perspektif konstruktif, kritik sejatinya merupakan ekspresi dari sebuah kepedulian. Tiap kritik pasti dimotivasi “rasa sayang” kepada orang atau lembaga yang menjadi sasaran kritik.

Memperlihatkan sikap reaktif saat menyikapi sebuah kritik justru menunjukkan ketidakdewasaan bersikap. Sebagai tokoh senior, Harifin maupun hakim-hakim agung yang memilihnya sebagai ketua MA pasti bersikap elegan terhadap kritik yang muncul. Mereka paham bagaimana mengelola nada-nada pesimistis tersebut sebagai autokritik demi menegakkan wibawa lembaga MA.

Memang kita tak bisa menafikan fakta bahwa Harifin merepresentasikan "orang lama" MA dan pernah memutus bebas terdakwa perkara korupsi. Hal inilah yang membuat sebagian pihak khawatir. Munculnya kekhawatiran tersebut sejatinya masih sebatas asumsi. Dalam tataran praktis, tidak semua "orang lama" identik dengan status quo.

Bahkan, banyak di antaranya justru melakukan berbagai tindakan radikal dan memimpin perubahan di lembaga yang dia pimpin. Setidaknya kepemimpinan Antasari Azhar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi rujukan. Saat terpilih sebagai ketua KPK, Antasari jugalah yang menuai kritik.

Latar belakangnya sebagai seorang jaksa karier yang bertugas di lingkup Kejaksaan Agung memunculkan pesimisme bahwa Antasari tidak akan gencar memberantas korupsi. Faktanya, justru pada setahun masa kepemimpinan Antasari banyak kasus korupsi berskala besar terungkap. Bahkan sejumlah tersangka korupsi "kelas atas" seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan, tak luput dari jeratan KPK.

Tidak hanya Antasari. Ketua KPK sebelumnya, Taufiqurrachman Ruki, yang juga identik sebagai "orang lama" karena pensiunan polisi, mampu memimpin KPK dan menjadikan lembaga tersebut paling disegani dalam hal pemberantasan korupsi. Begitu juga dengan kepemimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Siapa yang meragukan kepemimpinannya, kendati dia berasal dari lingkungan internal Kejaksaan Agung. Mengenai putusan bebas terdakwa korupsi yang pernah dibuat Harifin, kita sebaiknya positive thinking saja. Sudah menjadi asas bahwa putusan hakim dapat beraneka ragam, yaitu dijatuhkan hukuman, dibebaskan, dilepaskan, atau dinyatakan dakwaan atau tuntutan tidak dapat diterima.

Berbagai putusan tersebut didasarkan atas bukti-bukti di persidangan, bukan dugaan belaka. Sepanjang penuntut umum bisa membuktikan dakwaannya di pengadilan, bisa dipastikan hakim akan menghukum terdakwa sesuai dakwaan yang diajukan. Tidak selamanya seorang terdakwa itu harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Adagium yang berlaku menyatakan, putusan bebas tidak seluruhnya salah karena membebaskan orang bersalah sama buruknya dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Sudah saatnya kita memberi kesempatan kepada Harifin untuk memimpin dan melakukan perubahan di MA. Sebagai "orang dalam", tentu dia paling tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kewibawaan lembaga yang dia pimpin.

Setidaknya Harifin bisa melakukan tindakan pencegahan untuk menutup peluang terjadinya praktik-praktik kotor di pengadilan yang selama ini menjadi sorotan publik. Kita berharap Harifin tetap memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana janjinya se usai terpilih sebagai ketua MA.

Komitmen pemberantasan korupsi hendaknya tidak hanya diimplementasikan dalam setiap putusan hakim, tapi juga dalam pengelolaan keuangan di internal MA sendiri. Hal lain yang perlu menjadi perhatian Harifin adalah adanya support dari pimpinan MA terhadap kinerja Komisi Yudisial (KY).

Bagaimanapun eksistensi KY sangat dibutuhkan sebagai salah satu lembaga yang mengontrol tingkah laku para hakim terkait perkara yang diputuskan. Jangan sampai para hakim justru mendemonstrasikan rasa tidak suka terhadap keberadaan KY, sehingga menimbulkan interpretasi negatif terhadap sikap mereka. (Sindo)

Jakarta, 16 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu